

**PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN
PADA MASA ORDE BARU
(POTRET PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI INDONESIA)**

Darman Manda

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar

Email: darmanmanda@unm.ac.id

ABSTRAK

Transmigrasi merupakan aktivitas memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Di Indonesia program Transmigrasi sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, saat itu fokus wilayah transmigrasi adalah Lampung, yang sangat dekat dengan pulau Jawa. Pada zaman Pemerintah Orde Baru, progra transmigrasi mendapat perhatian besar dari Presiden Suharto, pertama dari cita-cita pemerintah saat itu berencana memindahkan 500.000 KK dalam waktu lima tahun, saat itu sebuah rencana besar, melibatkan beberapa departemen atau sekarang disebut kementerian seperti Depnakertrans, Pertanian, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri -termasuk di dalamnya Ditjen Agraria. Perhatian pemerintah boleh disebut makin besar ketika pada tahun 1983 membentuk Departemen Transmigrasi, yang salah satu menterinya Ir Siswono Yudohusodo.

Transmigrasi : Latar Lahirnya

Indonesia adalah negara yang subur dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat melimpah (mega biodiversity). Potensi keanekaragaman hayati tersebut merupakan salah satu yang terbesar di dunia setelah Zaire dan Brazil. Kekayaan sumber daya alam ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang harus bisa dimanfaatkan seefisien mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah tersebut, pasti diperlukan sumber daya manusia yang melimpah pula. Namun sayangnya potensi sumber daya manusia itu, tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Potensi sumber daya manusia Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa, Madura dan Bali. Kepadatan penduduk di pulau-pulau ini sampai sekarang adalah yang paling tinggi di Indonesia, padahal daya tampung dan daya dukung dari pulau-pulau ini untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan hidup bagi penduduknya sudah sangat minim.

Melihat ketimpangan antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut, maka pemerintah mencanangkan suatu program khusus yang diberi nama transmigrasi. Transmigrasi merupakan istilah bahasa Indonesia untuk migrasi. Transmigrasi secara lebih spesifik merupakan pemindahan penduduk dari pulau-pulau yang terlalu padat penduduknya ke pulau-pulau yang kepadatan penduduknya masih cukup rendah dan potensi alamnya masih belum digarap secara lebih intensif. Pola transmigrasi sebenarnya sudah cukup lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Menurut sejarah, program transmigrasi awalnya diselenggarakan oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada masa penjajahan dengan nama kolonisasi pertanian, walaupun terdapat perbedaan istilah dengan program saat ini serta di dalamnya terdapat kepentingan kaum penjajah. Pada masa itu, secara tidak langsung pemerintahan kolonial Belanda telah menerapkan pola transmigrasi dengan membawa banyak orang pribumi (terutama suku jawa) untuk melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Orang-orang pribumi tersebut awalnya dipekerjakan sebagai pembantu dan pelayan, atau tukang kebun bagi orang-orang

Belanda. Hingga adanya pergantian kekuasaan oleh pemerintahan pusat kolonial Belanda, maka mereka tetap mengabdikan pada satu majikan (meneer) yang sama hingga akhirnya sang majikannya harus pindah tugas ke tempat lain. Namun karena merasa betah dan merasa cukup sejahtera tinggal di pulau itu, maka orang-orang pribumi tadi tetap tinggal dan berkeluarga di tempat itu. Fenomena transmigrasi ini nampaknya kemudian berlanjut setelah Indonesia mengenyam kemerdekaan, khususnya pada masa Orde Baru. Orde baru berlangsung sejak Soeharto secara resmi diangkat sebagai presiden Republik Indonesia ke dua menggantikan Ir. Soekarno pada tahun 1966. Orde baru berakhir pada tahun Mei 1998 saat Soeharto mundur sebagai presiden setelah menjabat selama 32 tahun. Runtuhnya rezim orde baru ini dimulai dengan krisis moneter pada 1997 yang menghancurkan perekonomian Indonesia. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merajalela, sehingga terjadi demo besar-besaran dan kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Setiap pemerintahan pasti memiliki hal yang baik dan buruk. Begitu pula pemerintahan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun itu memiliki hal positif yang perlu kita akui. Salah satu sisi positif dari pemerintahan orde baru dalam bidang pembangunan, khususnya mengenai tata kelola kependudukan adalah adanya program transmigrasi.

Pada era Orde Baru pembangunan nasional bisa dilakukan dengan baik karena adanya rencana pembangunan yang berkelanjutan. Mulai dari rencana pembangunan tahunan, lima tahun (PELITA) hingga dua puluh lima tahun. Semua tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dimana orde baru menetapkan arah yang jelas dan tegas terhadap kemana bangsa Indonesia akan menuju. Salah satu unsur yang tertuang dalam rencana pembangunan itu adalah program untuk mengembangkan daerah yang masih tertinggal, namun memiliki potensi Sumber Daya alam yang memadai. Olehnya itu dilaksanakanlah program transmigrasi tersebut.

Program transmigrasi juga sukses pemeratakan jumlah penduduk di Indonesia. Tingkat kemiskinan dan kepadatan di pulau Jawa yang cukup tinggi diatasi dengan memindahkan sebagian penduduk ke pulau lain yang bisa dihuni dengan tujuan mendapatkan tempat yang layak untuk bertani. Daerah tujuan untuk transmigrasi antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sudah banyak kisah transmigran yang sukses mendapatkan penghidupan yang layak disana setelah puluhan tahun meninggalkan kampung halaman. Adapun Jenis transmigrasi yang dipraktekan pemerintahan Orde Baru ada dua macam, yakni:

1. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Di tempat tujuan, transmigran mendapatkan lahan seluas dua hektar, rumah, alat pertanian dan biaya hidup selama dua tahun.
2. Transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang digagas oleh transmigran sendiri. Pemerintah hanya mengorganisir dan membiayai perjalanan dari daerah asal ke daerah tujuan transmigrasi. Ongkos lainnya dibebankan kepada para transmigran.

Namun program transmigrasi di era Orde Baru bukan bertujuan untuk memindahkan sekelompok masyarakat ke daerah lain dalam rangka dipekerjakan pada perusahaan swasta, tetapi perpindahan itu dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan penduduk dengan jumlah lapangan kerja yang ada di daerah asalnya, dalam arti bahwa transmigrasi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan mendorong mereka untuk lebih aktif bekerja dalam mengelola sumber daya alam di daerah baru yang mereka datangi.

Dalam pandangan pemerintahan Orde Baru, Transmigrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, serta sebagai strategi nasional untuk perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan pengentasan kemiskinan (melalui pembekalan akses ketrampilan, manajemen, penguasaan teknologi, akses modal dan pasar. Transmigrasi akan berjalan dengan kendala yang minimal apabila pendekatan multikultural, perubahan wawasan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat (masyarakat pemukim maupun masyarakat sekitarnya) diakui dalam strategi pembangunan nasional sehingga tercipta alikulturasi dan tidak terjadi konflik sosial. Selanjutnya pembangunan permukiman transmigrasi dapat dilaksanakan dengan baik bila pelaksanaannya mempunyai produktivitas berkesinambungan untuk berusaha, serta ramah lingkungan dapat dipenuhi.

Dalam perdebatan yang berkepanjangan mengenai pembangunan dan pemerataan selama pemerintahan Orde Baru, Indonesia merupakan suatu batu ujian yang sangat kontroversial (Arndt, 1994 : 100). Salah satu isu yang mengemuka dan mendapat perhatian yang luar biasa pada saat itu adalah mengenai kepadatan penduduk di daerah Jawa, Bali dan Madura. Pertumbuhan penduduk di daerah tersebut begitu melaju, sementara lahan pertanian semakin berkurang seiring dengan munculnya perubahan terhadap fungsi lahan menjadi kawasan industri dan pemukiman penduduk. Hal ini berarti bahwa ternyata kehidupan manusia amat bergantung pada lingkungannya.

Perubahan besar dalam lingkungan hidup walaupun jarang terjadi, akan tetapi bila perubahan lingkungan hidup tersebut benar-benar terjadi, maka akibatnya sangat besar terhadap makhluk hidup termasuk kehidupan masyarakat manusia. Perubahan lingkungan pun sangat mempengaruhi system mata pencaharian hidup, dan ini pula mendorong terjadinya suatu perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan antara lain lembaga hak milik tanah yaitu lahan pertanian (Ranjabar, 2008 : 96). Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa Orde Baru, kegiatan pembangunan fisik terpusat pada daerah Jawa, sehingga efek dari pembangunan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, misalnya saja mereka tidak memiliki lagi lahan untuk kegiatan pertanian.

Tujuan Transmigrasi

Perhatian terhadap keterkaitan antara kependudukan, pembangunan dan lingkungan, mulai meningkat pada dekade tahun 1960-an. Sejalan dengan kekhawatiran akan pertambahan jumlah penduduk yang cepat, perhatian para perencana pembangunan dipusatkan pada usaha untuk memahami keterkaitan antara variabel kependudukan dan lingkungan, serta dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian usaha awal untuk mengatasi penyusutan sumberdaya alam, pada saat tingkat kelahiran masih tinggi, adalah dengan upaya penurunan angka kelahiran, sebagai upaya untuk menyelaraskan keseimbangan jumlah penduduk dan lingkungan.

Permasalahan pertambahan penduduk telah pula menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan di Indonesia. Diawali dengan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk, serta usaha penyebaran penduduk yang lebih serasi di seluruh kepulauan Indonesia pada awal Pola Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I). Kemudian dilanjutkan pada Repelita VI GBHN 1993, yang merupakan awal PJP II, menyatakan bahwa pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penciptaan keserasian antar generasi. Dengan demikian, dalam PJPT II

(GBHN 1993), cakupan prioritas pembangunan kependudukan bertambah meluas tidak hanya mencakup masalah pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, namun meliputi pula peningkatan kualitas penduduk serta perwujudan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Masalah kepadatan penduduk, kecepatan perkembangan dan pertumbuhannya, penyebarannya yang tidak merata, produktivitas rata-rata yang rendah, masalah pengangguran telah lama menjadi perhatian utama dan merupakan bagian dari sasaran perbaikan dalam strategi pembangunan sejak negara Indonesia mencapai kemerdekaan (Solaeman, 1992). Demikian pula di dalam pembahasan-pembahasan kesepakatan internasional, keterkaitan antara dinamika kependudukan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup telah banyak dibahas. Awalnya dimulai dengan pertemuan United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm pada tahun 1972, Population Conference tahun 1974, 1984, dan 1994, serta United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, yang intinya penekanan pentingnya keterkaitan antara kependudukan, sumberdaya dan lingkungan serta perlunya memperhatikan keberlangsungan keterkaitan antara jumlah manusia, sumber daya dan pembangunan.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik. Salah satu sumber perubahan yang mendorong suksesnya kegiatan pembangunan adalah adanya intervensi dari pemerintah. Intervensi tersebut diharapkan mempercepat proses perubahan dan pembaruan, mengaktualisasikan potensi masyarakat, mendorong prakarsa masyarakat dan mengembangkan kapasitas masyarakat. Bahwa intervensi, terutama intervensi pemerintah, lebih menonjol di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah suatu yang wajar dan dapat dipahami karena karakter masyarakatnya maupun proses pembangunannya termasuk dalam kategori perubahan social yang direncanakan (Soetomo, 2009). Salah satu program yang merupakan intervensi dari pemerintah adalah kegiatan transmigrasi yang dilaksanakan pada era Orde baru.

Transmigrasi memegang peranan yang sangat penting bagi berhasilnya usaha-usaha pembangunan. Transmigrasi selain mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu, juga memperluas landasan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan sektor-sektor lain, khususnya sektor pertanian. Disamping itu, transmigrasi juga menunjang usaha-usaha pembangunan daerah yang relative masih terbelakang. Dengan demikian transmigrasi menunjang usaha-usaha perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan dan pemerataan penyebaran pembangunan. Dalam pada itu transmigrasi juga menunjang usaha peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi melalui perluasan landasan kegiatan sektor lain, seperti pertanian dan perindustrian. (Ramdahan KH, Hamid Jabar, Rofiq Ahmad:1993)

Program transmigrasi mempunyai tujuan utama, dari saat-saat yang paling awal pada zaman kolonisasi sampai sekarang tujuan utamanya tidak pernah berubah yaitu menyebarkan penduduk. Akan tetapi akhir-akhir ini umum masih berpandangan bahwa tujuan utama program transmigrasi adalah mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa. Kemudian pada pertengahan tahun 1960an muncul pandangan yang lebih dinamis, yang memandang program transmigrasi bukan saja sebagai jalan keluar yang memang belum pernah berhasil bagi masalah kependudukan di Jawa tetapi juga sebagai sarana penyebaran sumberdaya manusia demi pembangunan daerah-daerah lain. Disamping

itu kenaikan tingkat hidup, pertambahan produksi pertanian, keamanan nasional dan integrasi nasional juga disebut-sebut sebagai keuntungan tambahan (Colin MacAndrew.1979)

Lebih lanjut Colin MacAndrew menerangkan bahwa program transmigrasi di Indonesia perlu diteliti untuk memperoleh penggolongan-penggolongan para transmigran. Walaupun dari dulu sampai sekarang banyak macamnya, tetapi saat ini dapat digolongkan ke tipe-tipe utama yang dibiayai pemerintah, yang dibedakan dari jumlah bantuan yang diterima. *Pertama* adalah transmigrasi umum yang dibantu sepenuhnya oleh pemerintah sejak dari waktu pemberangkatan sampai periode pemukiman awal sampai akhirnya diserahkan kepada marga setempat. *Kedua* dikenal sebagai transmigran swakarsa yang pindah atas prakarsa sendiri, namun mereka diperkenankan menetap di proyek pemerintah. Selain kedua tipe di atas ada juga transmigran swakarsa yang pindah atas prakarsa sendiri dan menetap tanpa bantuan pihak-pihak lain di daerah yang tak berpenghuni ataupun di tanah sewaan dari marga setempat. Tipe perpindahan terakhir yang berukuran besar dan penting artinya ini paling tidak jumlahnya sama dengan jumlah yang dipindahkan melalui program pemerintah.

Paradigma baru transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan (Suparno, 2006). Pada era Orde baru tujuan transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Meningkatkan pembangunan daerah.
3. Menyeimbangkan persebaran penduduk.
4. Melaksanakan pembangunan secara merata.
5. Memanfaatkan sumber-sumber alam dan tenaga manusia.
6. Memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Berdasarkan tujuan tersebut Program transmigrasi tidak hanya semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, tetapi juga berdampak dalam pemerataan pembangunan di daerah-daerah, dan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan Transmigrasi

Proyek Transmigrasi adalah suatu kunci untuk mensukseskan pembangunan pedesaan, sebab berhasilnya transmigrasi akan memecahkan masalah pangan dan lapangan kerja. Selain itu transmigrasi mutlak dan perlu memecahkan masalah kependudukan dan mendukung wawasan nusantara, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan atau mengembangkan budaya nasional yang saling memperkaya unsure-unsurnya (Daryanto, 1996 : 20). Pembangunan di bidang transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja, serta membuka dan mengembangkan daerah produksi dan pertanian baru di pedesaan. Transmigrasi juga ditujukan untuk menunjang usaha-usaha pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan pembagian pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Melalui transmigrasi diharapkan akan meluas juga kegiatan pembangunan di sektor-sektor lain seperti pertanian, industri, perhubungan, perdagangan dan lain-lain. Kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi di desa penerima terutama ditujukan

untuk menunjang usaha peningkatan produksi pangan dan tanaman keras melalui kegiatan ekstensifikasi, diversifikasi dan intensifikasi. Di samping itu, akan ditingkatkan pula pembangunan di bidang transmigrasi yang menunjang usaha industri baik industri kecil, menengah maupun industri besar. Dengan demikian diharapkan kegiatan pembangunan tersebut akan memanfaatkan semua sumber alam yang tersedia secara optimal, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintahan Orde baru menempuh dua jalur transmigrasi yakni transmigrasi spontan dan transmigrasi umum. Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, ongkos ongkos semua ditanggung peserta. Sementara transmigrasi spontan, semua ongkos ditanggung pemerintah, dan di lokasi memperoleh lahan seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan pertama untuk di daerah tegalan, dan 8 bulan pertama di daerah pesawahan menjadi tanggungan pemerintah. Jumlah seluruh transmigran yang berhasil dipindahkan pada periode ini sebanyak 182.414 orang atau sekitar 52.421 keluarga. Masih pada jaman orde baru, tepatnya tahun 1974 ketika Gunung Merapi meletus, ada kejadian seluruh warga desa diikutsertakan dalam program transmigrasi, di lokasi baru mereka menempati daerah yang sama. Dari kejadian inilah kemudian muncul istilah transmigrasi *bedol* desa.

Pada periode rencana pembangunan lima tahun (repelita) ke-2 antara tahun 1974-1979, konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditi ekspor. Produksi pertanian diharapkan dapat mendukung sektor industri sebagai cita-cita pembangunan.³⁵ Selain itu mulai tercetus pemikiran untuk mengembangkan daerah tujuan semenarik mungkin, sehingga akan banyak penduduk yang tertarik untuk pindah dari pulau Jawa dengan biaya mandiri tanpa tergantung pada pemerintah. Target transmigrasi pada repelita ke-2 adalah memberangkatkan 50 ribu keluarga atau 250 ribu orang per tahun, atau jika dihitung selama lima tahun, transmigran yang harus diberangkatkan sebanyak 1,25 juta orang. Target yang tidak realistis tersebut pada tahun 1976 dikurangi menjadi 108 ribu keluarga selama lima tahun, sedangkan realisasinya pemerintah hanya mampu memberangkatkan sebanyak 204 ribu orang atau sekitar 16 persen dari target yang dicanangkan.

Pada periode repelita kedua ini, pemerintah sangat intens melakukan kunjungan kerja ke daerah transmigrasi untuk bertatap muka langsung dengan para transmigran. Misalnya saja pada tahun 1975, Presiden Soeharto dan rombongan meninjau proyek transmigrasi pasang surut di Rantau Rasau, Provinsi Jambi. Di proyek transmigrasi ini, Presiden telah menyerahkan sejumlah hadiah kepada para transmigran. Hadiah tersebut berupa bibit kedelai jenis Orba, bibit padi varietas unggul, itik alabio, seperangkat mesin *buller*, dan alat-alat untuk keperluan keluarga berencana. Pada kesempatan itu Kepala Negara mengatakan bahwa proyek transmigrasi pasang surut ini sangat baik dan mempunyai prospek yang bagus, meskipun masih menghadapi banyak tantangan didalam usaha untuk mengembangkannya.

Selanjutnya dalam kunjungan kerjanya itu Kepala Negara meminta agar transmigran menggarap tanah secara semestinya, sehingga tidak saja mencukupi kebutuhan mereka sendiri, melainkan juga dapat memberi sumbangan pada pengadaan pangan bangsa Indonesia, sehingga ia

tidak perlu lagi mengimpor beras. Juga dipesankan agar petani di daerah ini meninggalkan cara bertani terpisah-pisah. Disarankan pula agar petani disamping melakukan usaha pertanian, menanam palawija, jagung dan lainnya, juga beternak, sehingga bila panen gagal, mereka masih mempunyai cadangan untuk kehidupan sehari-hari.

Masa selanjutnya, pada repelita ke-3 (1979-1983) ada penekanan yang lebih mendalam terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan transmigrasi spontan lebih didorong lagi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di luar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran. Target pemindahan transmigran sebanyak 250 ribu keluarga dapat dicapai, bahkan terlampaui sebanyak dua kali lipat. Pemerintah berhasil memberangkatkan sebanyak 500 ribu keluarga. Mengingat keberhasilan pada repelita ke-3, maka pada repelita ke-4 target transmigran ditingkatkan lagi menjadi 750 ribu keluarga atau 3,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberangkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang. Pada periode ini diintroduksi konsep tentang pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diberi misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksplotasi dan memelihara lingkungan hidup.

Memasuki Repelita 6 Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan desa dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan desa yang meliputi pemantapan kelembagaan pemerintah desa; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; pengembangan keswadayaan masyarakat; pengembangan perekonomian desa; pengembangan sarana dan prasarana desa; dan penghapusan kemiskinan. Sesuai amanat GBHN 1993, pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan Nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membuka daerah terisolasi, memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat dan jarang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan, dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah, khususnya daerah otonom, dalam Repelita VI terus ditingkatkan dengan tetap mengacu pada arah dan tujuan pembangunan nasional serta pada upaya perwujudan Wawasan Nusantara.

Dalam Repelita 6, pembangunan transmigrasi adalah bagian integral dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk pengembangan daerah produksi baru, perluasan lapangan kerja, peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah, dan peningkatan upaya pemanfaatan dan pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran transmigrasi dalam Repelita VI dikembangkan kebijaksanaan umum meliputi : (a) mengarahkan transmigrasi ke kawasan timur Indonesia, (b) mendukung pengembang-banglambat berkembang, (c) membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan (d) mendorong tumbuhnya transmigrasi swakarsa mandiri. Selain itu, ditentukan pula kebijaksanaan khusus seperti (a) mengembangkan agrobisnis, agroindustri, dan usaha lain di daerah transmigrasi, (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan transmigrasi, dan (c) mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta memanfaatkan iptek dalam pembangunan transmigrasi. Untuk melaksanakan upaya tersebut dikembangkan pemukiman transmigrasi dengan berbagai pola usaha yang terdiri dari pola usaha tanaman pangan, pola usaha perkebunan (pola PIR-Trans dan pola agro estate), pola usaha kehutanan (pola hutan tanaman

industri dan pola hutan tanaman rakyat), pola usaha perikanan (pola tambak dan pola nelayan), serta pola usaha industri dan jasa.

Kesimpulan

Program transmigrasi telah terbukti mampu meminimalisir permasalahan kependudukan. Pulau-pulau yang kepadatan penduduknya sangat tinggi seperti Jawa, Madura dan Bali, lambat-laun kepadatan penduduk mulai turun dan daya dukungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk mulai meningkat. Sedangkan pulau-pulau yang potensi sumber daya alamnya melimpah, namun potensi sumber daya manusianya kurang, telah berkembang dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya setelah diterapkannya program transmigrasi. Semenjak program ini diterapkan sampai dengan saat ini, sudah sangat banyak masyarakat transmigran dan masyarakat lokal setempat yang tingkat kehidupan dan kesejahteraannya meningkat. Kemampuan masyarakat transmigran untuk menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya mampu mensejahterakan dirinya sendiri namun juga mampu mensejahterakan masyarakat lainnya. Bahkan tidak jarang beberapa orang transmigran mampu mengubah nasibnya menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Hal ini tentu dapat terjadi karena kerja keras transmigran itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, H.W. 1994. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Daryanto. 1996. *Kependudukan*. Bandung : Tarsito.
- Heeren, H. J. 1979. *Transmigrate In Indonesia*. Jakarta. Gramedia.
- KH, Ramadhan. Hamid Jabbar, Rofiq Ahmad. 1993. *Transmigrasi Harapan dan Tantangan*. Departemen Transmigrasi RI. Jakarta.
- MacAndrew, Colin. & Rahardjo. 1979. *Pemukiman di Asia Tenggara dan Transmigrasi di Indonesia*. UGM. Gadjah Mada University Press.
- Mitchell, B. Setiawan B dan Rahmi, DH, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soelaeman, Munandar. 1992. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : Eresco.
- Suparno, Erman. 2007. *Pidato Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Ke - 57 Tahun 2007*. Diakses tanggal 2 April 2013. <http://bto.sisfo.net>.